

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 TRADISI SAPRAHAN**

Kajian berkaitan dengan Tradisi Saprahan dalam penelitian ini memamparkan kajian dengan konsepsi tinjauan tentang tradisi saprahan yang berkaitan dengan tradisi sebagai bagian dari budaya, saprahan sebagai tradisi atau budaya serta komponen tradisi saprahan beberapa poin tersebut akan dibahas sebagai berikut:

##### **2.1.1 Tradisi Bagian dari Budaya**

Tradisi lahir dari hasil cipta, rasa manusia juga tidak terlepas dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, tentunya dalam kehidupan bermasyarakat dan diwariskan dari generasi satu ke generasi selanjutnya (Khafidz, 2019). Tradisi ataupun budaya yang ada di Indonesia lahir dari leluhur dengan berbagai sejarah, kepercayaan dan mempunyai ciri khas keunikan tersendiri dari daerah satu dan lainya (Ati, 2018). Tradisi memiliki tujuan yang tepat untuk dicapai melalui kebajikan, dan kebaikan supranatural menjadi ukuran yang sejati, dan tradisi merupakan upaya dalam melawan kesewenang-wenangan individu (Smith, 2014). Sejalan dengan itu, tradisi adalah tindakan yang dikerjakan secara terus- menerus dalam wujud yang sama (Soerjono, 1990 hlm.181). Tradisi berisi gagasan, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan yang dilestarikan dari generasi ke generasi yang berkesinambungan dengan masa lalu, (Ferreiro, Sheikh, Reidolf, Sousa, & Bhaduri, 2019). Piotr Sztomka (2008, hln. 74-76) menekankan tradisi yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat memiliki fungsi diantaranya: (a) Tradisi merupakan kearifan yang diwariskan. Tempatnya keyakinan, pemahaman, aturan serta nilai yang dianut dalam wujud maupun bentuk kejadian masa lampau. (b) mencadangkan fondasi pandangan hidup, kepercayaan, pranata serta kebijakan yang telah dibuat: (c) menyajikan simbol ciri identitas banyak orang yang diyakini mampu menguatkan kepatuhan primordial terhadap suatu bangsa, khalayak serta maupun anggota. Dari penjelasan konsep diatas dapat dimaknai tradisi lahir dalam kehidupan masyarakat yang berisi keyakinan maupun sebagai simbol yang

menjadikan identitas serta ciri khas suatu daerah yang mana tradisi ini suatu budaya turun terumun yang di wariskan para leluhur.

Toto Tasmara (Tasmara, 2002, hlm.161) mengemukakan bahwa kandungan utama yang menjadi esensi budaya adalah sebagai berikut:

- 1) Budaya memiliki hubungan erat dengan pandangan mengenai nilai serta ruang lingkup kehidupan yang memanifestasikan hikmah dan falsafah hidup yang mampu memberikan pengaruh terhadap tingkah laku dan perbuatan (*the total way of life a people*).
- 2) Terdapat arahan untuk bersikap, nilai dan akhlak, perwujudan karya dan karsa manusia yang juga didalamnya seluruh instrument, komposisi kinerja serta teknologi (*a way thinking, feeling and believing*).
- 3) Budaya identik dengan pelajaran hidup, kebiasaan dan prosedur penyeleksian yang hasilnya terdapat dua pandangan penerimaan atau penolakan) dimana norma yang telah ada mampu menempatkan dan berinteraksi dalam ruang lingkup kehidupan yang eksklusif.
- 4) Ruang lingkup suatu budaya terdapat adanya depensi serta impresi baik itu dalam ruang sosial maupun nonsosial.

Selaras dengan konsep Koentjaraningrat (2009, hlm. 150-153) menegaskan suatu kebudayaan mempunyai sebagian bentuk yakni: (1) bentuk kebudayaan yang direfresentatif melalui pendapat, pandangan, nilai, kebiasaan dan aturan; (2) bentuk kebudayaan selaku tindakan maupun pola prilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat; (3) bentuk kebudayaan berupa suatu benda yang dilahirkan dan diciptakan melalui perbuatan manusia. Dimana bentuk kebudayaan yang telah di sebutkan memiliki sifat yang konkret dikarenakan menggambarkan entitas yang berasal dari seluruh buatan, penciptaan, kreasi, tindakan, kegiatan atau seluruh perbuatan individu yang dinamakan manusia dalam ruang kehidupan bermasyarakat. Tradisi maupun kebiasaan, adat –istiadat dapat juga dimaknai dengan adab prilaku, sebagaimana Koentjaraningrat (dalam Budiono, 2008, hlm. 164-165) mengklasifikasikannya ke dalam empat tahapan berupa; 1) nilai budaya, 2) norma, 3) aturan hukum, serta 4) tahapan aturan tertentu dari budaya yang berwujud suatu ide yang mampu mengkonsep hal yang ternilai pada kehidupan sosial masyarakat, lazimnya berpangkal pada komponen sentimental dan rohani

manusia. Tingkatan suatu norma ialah nilai budaya yang telah saling berkaitan terhadap kontribusi tersendiri masing-masing kelompok masyarakat pada lingkungan hidupnya. Untuk tingkatan terakhir berwujud standar tertentu yang mengendalikan aktivitas yang sangat dibatasi dalam ruang lingkup masyarakat secara nyata. Sehingga dapat dibuat sebuah kesimpulan tradisi merupakan aturan bersikap berlandaskan gagasan, ide yang disesuaikan dengan norma/peraturan yang berlangsung pada peraturan masyarakat setempat secara nyata. Kemudian M. Harris (dalam Stanley 2012, hlm. 9) mengungkapkan pandangannya budaya menggambarkan kebiasaan, tradisi serta kebiasaan hidup yang dimonitori dan dicapai dengan cara sosial oleh kelompok maupun komunitas masyarakat, yang di dalamnya terdapat pola pikir, pandangan dan perbuatan yang menjadi acuan serta diimplementasikan secara berulang. Harsojo, (1988, hlm. 93) juga menegaskan kebudayaan melingkupi keseluruhan tindakan yang merupakan hasil perbuatan manusia, teratur dengan adanya tata kelakuan, kemudian harus di capai dengan mempelajarinya yang mana keseluruhan tadi telah tertata rapi dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat.

Senada dengan konsep Ariyono dan Aminuddin( 1985, hlm. 4) menuturkan tradisi menurut kamus antropologi memiliki kesamaan dengan adat- istiadat yang berkaitan dengan suatu tindakan magis, keyakinan berdasarkan kehidupan masyarakat setempat yang bersumber pada nilai, kebudayaan, norma, peraturan serta tata aturan yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan akhirnya diyakini menjadi kesatuan system atau peraturan yang di terapkan serta mencakup segala konsep sistem kebudayaan dari budaya yang bertujuan untuk mengatur segala perilaku maupun tindakan manusia dalam kehidupan sosialnya. Hal ini mengisyartkan adanya hubungan kuat yang mengisyartkan bahwa tradisi merupakan bagian dari budaya, dimana tradisi lahir dari karsa, rasa dan cipta manusia serta berkembang dalam kehidupan manusia sedangkan wujud kebudayaan dapat berupa ide, gagasan, nilai, tradisi serta norma, aktifitas atau pola tindakan manusia dalam masyarakat serta hasil karya manusia, disinilah tercipta adanya hubungan tradisi yang merupakan bagian dari suatu kebudayaan. Dalam penelitian ini penulis berupaya mendeskripsikan tradisi Saprahan masyarakat Melayu di Kaputen Sambas, Kalimantan Barat juga merupakan tradisi yang sudah

lama berkembang dalam masyarakat setempat serta telah menjadi kebudayaan yang telah lekat dengan masyarakat tersebut.

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan di atas dapat di ambil sebuah kesimpulan tradisi merupakan gagasan yang berisikan kebijakan, kaidah, norma serta hasil karya manusia yang tercipta dari masa lampu yang di wariskan dari generasi ke generasi serta berkembang dalam kehidupan masyarakat yang berwujud sebagai budaya tradisi dan adat istiadat.

### 2.1.2. Komponen Tradisi Saprahan

Kabupaten Sambas merupakan satu bagian Kabupaten Sambas di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki seni budaya dan adat istiadat yang masih kental dan asli, terpelihara dari pengaruh perkembangan zaman. Budaya serta adat istiadat yang ada di Kabupaten Sambas sangat kental dengan keasliannya berbeda dari daerah lain diluar Kabupaten Sambas salah satunya adalah Tradisi Saprahan atau yang lebih dikenal denan tradisi Makan Besaprah, tradisi ini merupakan tradisi turun temurun yang merupakan ciri khas dari tradisi masyarakat Melayu Sambas yang sampai sekarang masih tetap terjaga kelestariannya (S. Arpan ,2009 hlm. 2). Kabupaten Sambas terletak di bagian paling utara Provinsi Kalimantan atau diantara 2°08´ Lintang Utara serta 0°33´ Lintang Utara dan 108°39´ Bujur Timur serta 110°04´ Bujur Timur, secara administratif batas wilayah Kabupaten Sambas adalah: Utara ; Serawak ( Malaysia Timur) & Laut Natuna, Selatan; Kab. Bengkayang & Kota Singkawang, Barat; Laut Natuna dan Timur; Kab. Bengkayang & Serawak (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, 2010 hlm. 3). Taufik (2007) Secara etnisitas, masyarakat yang mendiami Kabupaten Sambas sangat beragam yaitu Melayu Sambas, Dayak, Cina, Jawa dan kelompok etnis lainnya. Senada dengan itu Muntasyir, R (2015, hlm. 8-9) Melayu Sambas merupakan salah satu etnis kesukuan Melayu yang mempunyai keunikan dari berbagai aspek seperti adat- istiadat, kesenian serta bahasa. Masyarakat adat (*indigeneous people*) didefinisikan sekumpulan komunitas (masyarakat) yang memiliki kesamaan asal, leluhur, serta adanya aturan sistem ideologis, nilai, kepercayaan, politik, sosial budaya dalam area geografis tertentu serta memiliki zona tersendiri. Purwana (2018) menuturkan Masyarakat Sambas memiliki keragaman di karenakan adanya subsub kebudayaan etnis yang beragam jenisnya.

Masyarakat ini dibedakan karena tidak mempehatikan perkembangan sistem nilai yang menjadi kesepakatan seluruh anggota setiap masyarakatnya, komunitas etnis Melayu Sambas selalu menjaga keutuhan kesisteman nilai yang menjadi kebudayaan khas sukunya. Walaupun penduduknya mayoritas suku Melayu Sambas, namun berdasarkan penelitian Linguistik adalah bagian rumpun Suku dayak terkhusus Dayak Melayik yang diturunkan oleh tiga Suku Dayak yakni Dayak Meratus/ Bukit (Alias Banjar Arkhais yang dikelompokan Bahasa Melayu), Dayak Iban dan Dayak Kedayann (biasa juga ditulis Kanayatin). Dalam Pengantar Alkadri dalam Buku *Bunga Rampai (Seni, Budaya dan Sejarah Pejuang Sambas)* menjelaskan Ciri khas masyarakat Melayu Sambas adalah masyarakat konservatif transparan yang diartikan masyarakat yang masih konsisten menjalankan tradisi dengan teguh dan masih terbuka menghargai masuknya kebudayaan dari luar selama tidak bertentangan dengan tradisi, terutama dengan ajaran Islam yang dianut masyarakat setempat. Hal ini mengisyaratkan bahwasanya masyarakat Melayu Sambas di Provinsi Kalimantan Barat adalah lestarikan dalam artian masyarakat Melayu Sambas merasa bahagia dan merasa senang bila mereka mampu melaksanakan apa yang telah diadatkan pada mereka salah satunya adalah tradisi Saprahan yang lebih dikenal dengan Makan Besaprah namun tidak menutup diri dari budaya luar. Depdikbud. RI. Adat Istiadat Kalimantan Barat (1994) mengungkapkan saprahan adalah bagian kebudayaan masyarakat Melayu Kabupaten Sambas yang sangat dilestarikan dan terjaga keutuhannya dari dulu hingga sekarang, tak lekang dan terpengaruh oleh arus global dan tetap dilestarikan oleh masyarakat setempat.

Menurut tokoh agama di Kota Sambas H. Hamidin (dalam Fathan Mu'in, 2017) mendefinisikan makan besaprah adalah makan secara bersama dilantai tanpa menggunakan meja dan kain sedangkan lauk dan penyajiannya dikenal dengan saprahan, sedangkan H. Mujahidin salah satu tokoh agama juga akademisi IAIS Sultan Muhammad Shofiuddin Sambas mengatakan bahwa makan besaparah adalah makan dengan jumlah tidak lebih dari enam orang yang saling melingkar dan berhadapan menghadap makanan, yang dilakukan secara bersama- sama dalam bentuk lingkaran bulat. Terkait itu Wahab, Erwin & Purwanti (2020) memaparkan pandangannya Saprahan identik dengan formasi bulat yang menyamai lingkaran,

dimana dibentuk oleh enam orang yang disimbolkan dengan jumlah unsur keyakinan dalam Rukun Iman dan bilangan menu yang terdiri dari lima jenis yang dilambangkan dari unsur keIslaman dalam Rukun Islam hal ini mengisratkan saprahan berasal dari kata arab *safrah* yang berarti bulat ataupun dapat disebut juga dengan bundar. Sejalan dengan itu, Firdaus & Hodiyanto (2019) menyebutkan tradisi besaprahan umumnya berkaitan dengan tradisi Islam yang berkembang pada masyarakat Melayu Sambas, aktivitas saprahan pun identik dengan ciri khusus dari masyarakat Melayu tersebut. Ini mengakibatkan antara Islam dengan Melayu Sambas cenderung diyakani saling merepresentasikan antara satu sama lain. Pada tataran ini Melayu tidak hanya dianggap sebagai identitas kesukuan, tetapi juga merepresentasikan agama seseorang yaitu Islam (Pabali, 2010). Belum terdapat literatur yang memastikan sejak kapan tradisi ini berkembang dan lahir, namun yang pasti banyak para tokoh masyarakat yang berpendapat bahwa tradisi ini ada kaitanya dengan ajaran Islam yang menjadi keyakinan mayoritas masyarakat Melayu Sambas. Kesultanan Islam Sambas mencapai puncak kebesarannya yang dinamai dengan Serambi Mekkah. Para Ilmuan Islam bercorak modernisasi seiring bergiliran pada masa pemerintahan Maharaja Imam Sambas diduduki oleh Muhammad Basuni Imran (Syafaruddin Usman MHD, 2011, hlm. 10-13). Namun ada juga yang menyebutkan pedagang Melayu dan Arab datang ke Sambas untuk menyampaikan ajaran Islam. Sejarah mencatat bahwa Islam telah lama ada di ranah Melayu. Zakaria (2012: 92) mengungkapkan faktor yang menonjol yang mampu menembus sendi kebudayaan masyarakat Melayu yakni adanya unsur agama dan ciri adanya kepercayaan. Orang Melayu menerima Islam tidak hanya terkait dengan sistem kepercayaan dan ritual, tetapi juga unsur budaya yang dibawa (Usman (2011, hlm. 108). Realitas di atas menunjukkan bahwa Islam memiliki pengaruh penting dalam kehidupan Melayu Sambas. Oleh karena itu wajar jika tradisi makan *besaprahan* yang merupakan produk budaya tetap dipertahankan oleh Melayu Sambas karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam (Agus, 2012). Rianawati (2019) memandang pengaruh ajaran agama dan tradisi agama Islam sendiri juga berkembang sebagai tradisi saprahan yang bercirikan makan dengan duduk bersila adalah prioritas dalam Islam yang telah disunahkan Rasulullah SAW. Hal ini dikarenakan dalam budaya makan besaprahan terdapat nilai- nilai luhur yakni terdiri

dari unsur- unsur sebagai berikut: Pertama, harus ada 1 (satu) nasi yang melambangkan bahwa sumber kehidupan hanyalah satu Allah yang telah memberikan kehidupan dan keberuntungan sehingga manusia harus berterima kasih. Kedua, harus ada 2 (dua) sendok ikan / daging/ sayuran, dan lain- lain yang melambangkan pernyataan tentang terhadap dua syahadat sebaga kunci iman manusia. Ketiga, harus ada 5 (lima) *pekare* (baca: semacam) ikan / daging / sayuran sebagai simbol lima pilar Islam di mana setiap muslim harus mengamati, Keempat, harus ada 6 (enam) orang disaprahan sebagai lambang enam pilar dasar imam yang harus diintegrasikan ke dalam kehidupan manusia. Kelima, harus ada satu wadah kecil yang diisi air bersih untuk mencuci tangan. air untuk mencuci tangan disajikan sebagai simbol kebersihan fisik dan mental ketika manusia membangun hubungan dengan manusia atau hubungan lain dengan Allah (Safiudin dalam Wahab,2017). Tradisi Saprahan yang merupakan cari khas Melayu Sambas memiliki cara makan yang unik yaitu duduk melingkar di lantai berjumlah enam orang. Tradisi Saprahan mengandung perumpaman “duduk sama rendah berdiri sama tinggi” dimana perumpaman ini memiliki makna kebersamaan yang tinggi dan solidaritas sosial serta cerminan tradisi duduk bersila dilantai sembari mencicipi makanan khas Melayu (Pridaningsih, 2008). Sementara itu, Lizawati (2017) mengungkapkan dalam tradisi Saprahan erat akan suatu nilai-nilai sosial yang semakin memperkokoh persaudaraan dalam masyarakat, berjiwa kemasyarakatan tinggi, nilai persaudaraan yang kokoh mengintari masyarakat Sambas yang telah membudaya serta eratnya sebuah kebersamaan yang tercipta antara sesama individu yang tercermin pada masyarakat Melayu Sambas.

Selanjutnya S. Arpan (2009, hlm.4-10) menjelaskan saprahan adalah kegiatan makan bersama- sama yang posisi duduknya bersila secara berkelompok di mana dalam kelompok tersebut diisi oleh 6 (enam) orang saja. Muzayanah (2017) menjelaskan pendapatnya bahwa saprahan merupakan tradisi masyarakat Melayu untuk melayani tamu dalam bentuk proses makan bersama membangun kebersamaan, keterbukaan, kepedulian dan kesopanan. Saprahan telah mentradisi sehingga kegiatan ini selalu dilakukan dalam keseharian makan dirumah, terlebih menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat di Kabupaten Sambas ketika mereka menyelenggarakan acara atau pesta mengundang masyarakat untuk hadir, saprahan

menjadi akses mereka untuk menjamu tamu yang datang. Adapun manfaat dalam pelaksanaan saprahan sebagai berikut: (1) memperkuat persaudaraan (silaturahmi) antara individu satu dengan individu lain, (2) sebagai sarana komunikasi untuk penyaluran informasi; (3) sarana penyampaian dakwah dalam acara keagamaan; (4) memperkuat kebersamaan serta menjadi sarana untuk mengenal karakter masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya lebih jauh dan terakhir (5) melastarikan budaya pusaka nenek moyang. Dikutip dalam buku Saprahan (adat Melayu Sambas) juga mengungkapkan terdapat bentuk – bentuk saprahan serta jenis- jenis saprahan sebagai berikut:

Umumnya tradisi saprahan terbagi dalam dua bentuk. Pertama, saprahan dalam bentuk memanjang dimana cara penyajiannya dihidangkan dengan kain yang memanjang berwarna putih sesuai dengan jumlah tamu yang diundang kemudian tamu dipersilahkan untuk duduk secara bersemuka dalam tempat yang telah dipersiapkan. Kedua, saprahan dalam bentuk pendek yang hanya menghamparkan sebuah kain untuk dijadikan alas untuk meletakkan makanan yang akan disajikan kepada tamu undangan, dimana kain tersebut biasanya berukuran 1x1 meter (Arpan, 2009).

Sedangkan dari bentuk saprahan pendek, mempunyai 3 (tiga) jenis aturan sajian yakni: (1) saprahan bulat dengan alas saprah, ialah sajian saprahan yang menggunakan alas kain berukuran 1x1 meter lalu untuk lauk- pauknya diletakan ditengah, sedangkan piring nasi, gelas berisi air beserta piring kecil berisi air cucian tangan dan batel diletakan disamping depan lauk- pauk. (2) saprahan membujur dengan alas saprah, ialah sajian saprahan menggunakan alas kain berukuran 1x1 meter, diatas alas kain diletakan sajian makan berupa lauk pauk lengkap dalam piring makanan, kemudian bagian paling ujung saprahan ditempatkan piring saprahan yang berdekatan dengan piring kecil berisi air cucian tangan dan alas bakinya. Kemudian dibagian paling samping tadi, diletakan piring yang berisi nasi serta lauk pauk yang terdiri dari enam jenis kemudian disusun gelas air minum secara berurutan panjang, kemudian sajian disantap bersama- sama; (3) saprahan membujur dengan alas baki ialah penyajian saprahan yang tersusun rapi dengan susunan berisi piring yang disediakan untuk makan dibagian paling atas berdampingan batel air cuci tangan, serta sebuah baki berukuran besar didalamnya terdapat lauk- pauk. Piring berisi nasi beserta lauk pauk tadi diletakan dibagian



paling kanan baki lauk dan baki gelas yang berisikan air untuk minum. Sehubungan dengan penjelasan diatas tradisi saprahan dalam masyarakat Melayu Sambas mengandung sebuah unsur sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem keagamaan, bahasa serta mengandung seni (Hemafitria, Budimansyah, D & Winataputra, 2018).

S. Arpan, (2009, hlm 1-2) dalam bukunya *Saprahan adat Melayu Sambas* kembali menegaskan perkembangan IPTEK yang cukup pesat sangat memudahkan komunikasi langsung maupun tidak langsung yang diikuti pengaruh budaya yang satu dengan budaya lainnya juga mengakibatkan pemikiran baru dalam masyarakat, contohnya masyarakat bertindak rasional dan ingin segalanya praktis, jika ini semakin terjadi terus menerus maka kebiasaan semula yang dipertahankan akan perlahan pudar dan ditinggalkan bahkan dilupakan serta dianggap remeh. Untuk itu perlunya mengokoh semangat yang kuat dalam menjaga kelestarian tradisi ini. Penyelangan acara Saprahan umumnya tidak dapat dilakukan dengan sendiri, tetapi membutuhkan tenaga orang banyak, karena dalam saprahan merupakan tercipta adanya gotong royong yang kuat dan tak terpisahkan antara individu yang satu dan lainnya. Masyarakat mampu mengemban kedudukan serta fungsinya dengan baik sehingga dalam pelaksanaan kegiatan memunculkan gotong royong serta menguatkan kekompakan maupun solidaritas dalam diri setiap masyarakat (Rolitia, Achdiani, & Eridiana, 2016). Tradisi saprahan juga memunculkan rasa senasib sepenanggungan, terkait konsep Elly M & Setiadi (2006, hlm. 85) adanya kesadaran setiap anggota masyarakat dalam mengemban kedudukannya dan setiap anggota mampu melaksanakan kedudukannya sejalan dengan takarannya masing-masing mampu menumbuhkan unsur sepenanggungan (Elly, M. & Setiadi, 2006, hlm. 85). Prasojo (King, Ibrahim, & Hassan, 2017) menegaskan salah satu ciri orang Melayu di Provinsi Kalimantan Barat adalah menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Selaras dengan konsep Nalin (dalam Zahara, 2016, hlm.3) mengungkapkan sistem kerja adalah rangkaian susunan yang tersusun antara aturan kerja dan tata cara kerja yang membentuk satu acuan dengan spesifik sehingga mampu menyelesaikan suatu pekerjaan. Pelaksanaan saprahan, juga terdapat hal unik yang dilakukan masyarakat, masyarakat tak semata datang untuk makan saja, namun juga mereka melakukan *Antar pakatan*, *Antar pakatan* merupakan tradisi yang dilakukan pada hari kecil sebelum esoknya pelaksanaan

saprahan diselenggarakan. Riva'i dan Budjang (2015) menegaskan ketika sore hari setelah kegiatan meminjam barang, dilakukanlah acara antar antar pakatan (hari kecil). *Antar pakatan* disebut masyarakat Melayu Sambas dengan hari kecil (hari pertama acara pokok diselenggarakan), tantunya *pakatan* ini disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan orang yang memberi *pakatan*. Sementara terkait konsep, Atem (2014, hlm. 113: dalam Julia) mengungkapkan bahwa antar pakatan merupakan adat yang telah membudaya yang mana individu atau kelompok keluarga yang telah di undang kerumah tuan pembuat acara saprahan secara sukarela membawa uang dan seekor ayam serta beras, dalam artian masyarakat membantu mensukseskan acara baik bantuan dari segi tenaga maupun berwujud barang berupa beras, duit, serta seekor ayam, tamu yang di undang itu membawa beras sekitar satu kilo yang dimasukan kedalam baskom atau ember kecil yang ada penutupnya atau bias juga menggunakan kantong hitam. Antar pekatan menandakan masyarakat juga memberi aspreasi yang tinggi terhadap tuan rumah yang mengadakan acara saprahan. Kemudian selain antar pakatan biasanya untuk mensukseskan acara saprahan masyarakat bahu membahu untuk melakukan gotong royong secara bersama-sama. Abdul Hadi (2011) juga memperkenalkan istilah tarup merupakan suatu bangunan yang dibuat memanjang yang dipergunakan untuk tempat para tamu saro'an (undangan).

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan tradisi saprahan adalah tradisi makan besaprah yang secara khusus menjadi ciri khas dari masyarakat Melayu khususnya di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, dimana dalam acara makan besaprah ini dilakukan secara bersama- sama dilantai tidak menggunakan kursi dan jumlah orang serta lauk pauk dalam satu saprahan terdiri dari 6 (enam) orang dengan posisi duduk saling berhadap atau melingkari hidangan yang disiapkan, serta tradisi ini juga merupakan tradisi yang dilakukan dalam acara apapun termasuk pernikahan, khitanan maupun pada saat makan dirumah bersama keluarga serta mengandung nilai- nilai kehidupan yang masih dijunjung tinggi masyarakat Melayu Sambas.

### **2.1.3. Peran Tokoh Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Tradisi Saprahan**

Lestarnya dan tetap eksisnya tradisi saprahan saat ini, tentunya tak dapat terpisahkan dari peran tokoh- tokoh masyarakat dalam membimbing, membina,

mengarahkan masyarakat dalam menjaga kelestarian tradisi saprahan masyarakat Melayu Sambas di Kalimantan Barat. Miriam Budiarjo (1972, hlm. 10) menyebutkan hakikinya tokoh masyarakat adalah orang yang memiliki kedudukan yang luas dalam satu kapasitas besar dan kekuasaan dalam anggota masyarakat berupa kekuatan untuk mempengaruhi individu, kelompok dengan arahan yang diinginkannya. Rogers (1983) juga mengungkapkan pandangannya tokoh masyarakat dapat memainkan peranan dalam penyebaran informasi, motivasi melalui hubungan sosial yang intim, dimana mereka dapat berperan menyampaikan ide-ide serta informasi kepada masyarakat. Dalam peranan mengayomi masyarakat yang memiliki daya mempengaruhi pola pikir dan tindakan masyarakat, tokoh masyarakat diharapkan mampu memiliki jiwa kepemimpinan. Dimana kepemimpinan dianggap menjadi figur yang baik, hal ini dikarenakan masyarakat menandai dirinya serta mengkonsultasikan setiap permasalahan kepada pemimpin bahkan mereka beranggapan pemimpin menjadi alat penghubung serta penyambung aspirasi masyarakat (Porawouw, 2016). Semakin dipertegas Imam (2014) dalam tulisannya pemimpin diharapkan cakap menjawab segala kekhawatiran masyarakat yang sedang ia pinpin. Karena tokoh masyarakat merupakan unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat karena tokoh masyarakat harus mampu membangun hubungan sosial yang lebih kompleks dibandingkan dengan bawahannya, pengetahuan yang luas melebihi orang disekitarnya, dan tidak menyimpan kemampuan yang ia miliki untuk dirinya sendiri, justru sebaliknya menggunakan pengetahuan tersebut demi kepentingan masyarakat maupun kelompoknya (UU RI No. 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6). Unsur selanjutnya biasanya tokoh masyarakat harus mampu mengembang tugasnya juga sebagai penegendalian sosial dalam masyarakat guna menghindari pertikaian dalam masyarakat. Herabudin (2015, hlm. 101) memaparkan para tokoh masyarakat mempunyai keharusaan untuk dapat melaksanakan tanggung jawab sebagai pengendalian sosial terhadap masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan di atas dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwa tokoh masyarakat merupakan unsur terpenting yang harus ada dalam kehidupan sosial masyarakat, hal ini dikarenakan tokoh masyarakat menjadi pengendali dan kontrol sosial bagi masyarakat berusaha melakukan pembimbingan,

penganyoman dan pembinaan guna menghindari pertikaian dalam masyarakat dan menciptakan ketertiban serta kedamaian bagi masyarakat.

## 2.2 KEARIFAN LOKAL DAN ERA GLOBAL

Kajian berkaitan dengan Kearifan Lokal dan Era Global dalam penelitian ini memamparkan kajian dengan konsepsi Kearifan Lokal yang berkaitan dengan pengertian kearifan lokal, bentuk- bentuk kearifan lokal serta sifat- sifat kearifan lokal sedangkan untuk konsepsi Era Global memaparkan hal yang berkaitan dengan pengertian era global (*globalization*), ciri- ciri dari sebuah globalisasi dan dampak globalisasi yang mempengaruhi segala aspek kehidupan termasuk kebudayaan beberapa poin tersebut akan dibahas sebagai berikut :

### 2.2.1. Pengertian Kearifan Lokal

Kearifan Lokal yang populer disebut (*Local Wisdom*) Mengutip dari Edi Santoso (dalam, Ranto, 2017) menyebutkan kearifan lokal dapat dimaknai sebuah pemikiran yang bersifat lokalitas yang bermakna baik sekaligus bersifat arif ( kebijaksanaan) selalu menyatu, diyakini serta dipatuhi masyarakat dilingkungan tempat ia tinggal. Lebih lanjut ia menegaskan kearifan lokal diartikan sebagian dari pandangan berupa pengetahuan yang bersifat lokal serta menyatu dengan kebudayaan, kepercayaan dan norma, kemudian dimanifestasi ke dalam bentuk adat- istiadat serta keyakinan secara kontinyu. Senada dengan itu Vitasurya (2015, hlm. 99) mengungkapkan kearifan lokal tumbuh melalui sebuah proses internal yang panjang konsekuensi dari adanya komunikasi serta hubungan timbal- balik masyarakat dan lingkungannya, dimana hal ini akan membentuk nilai yang melebur dalam wujud kepercayaan, peraturan serta kebudayaan lokal. Sementara itu konsep kearifan lokal (*local genius*) oleh Quaritch Wales (dalam Astra 2004: 112: Brata , 2016 ) adalah “...*the sum of cultural characteristic which the vast majority of people have in common as a result of their experiences in early life* ” atau keseluruhan karakteristik kebudayaan milik sebagian orang termasuk masyarakat, bangsa akibat dari perbuatan, pengalaman, pelajaran dimasa terdahulu. Dalam hal ini kearifan lokal lekat kaitanya dengan sebuah bangsa sebagaimana Wibowo (2015, hlm. 17) menegaskan kearifan lokal merupakan wujud jati diri atau karakter kebudayaan suatu bangsa yang mengakibatkan bangsa sanggup untuk menyaring, mengendalikan bahkan mengelola budaya luar yang masuk menjadi kepribadian

(watak) dan keahlian. Tentunya untuk menyerap kebudayaan tersebut sehingga menjadi sebuah watak maupun perilaku disesuaikan dengan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Peranan kearifan lokal begitu berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebab kearifan lokal merupakan intensitas yang dapat bertahan dari gangguan komponen-komponen luar yang datang serta tumbuh pada waktu mendatang. Musnahnya kearifan lokal dalam masyarakat, ini menunjukkan memudarnya karakter suatu masyarakat sebaliknya apabila kearifan lokal terus-menerus berkembang serta dapat bertahan berarti semakin memperkuat karakter dalam masyarakat. Sebagaimana Pasal 32 UUD 1945 Juga menegaskan bahwa "pemajuan kebudayaan nasional Indonesia dalam arus kemajuan dunia merupakan tugas negara yang tujuan sebagai penjaminan prerogatif masyarakat dalam pemeliharaan serta pengembangan nilai budaya yang dimiliki. Meningkatkan penilaian seni dan produktivitas karya tradisi dan serta budaya yang mejadi aset kebudayaan bangsa yang penting dijaga, lindungi dan tumbuh kembangkan oleh setiap warga negara (Indrajo, 2016, hlm. 2). Penjelasan diatas menunjukkan betapa pentingnya mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal dalam segala dimensi kehidupan bermasyarakat baik dari segi kebiasaan hidup, paradigma serta perilaku, rekognisi dan opini nilai masyarakat (Mahardika & Darmawan,C, 2016). Bentuk dari kearifan lokal adalah terciptanya kesatuan dan toleransi beragama yang berwujud praktek sosial sedangkan bentuk kearifan lokal di masyarakat dapat berwujud norma, kepercayaan, peraturan adat, etika, nilai serta sebuah aturan tertentu (Haryanto (2014, hlm. 212). Sutarto (2006, hlm. 1) memaparkan kearifan lokal dijadikan patokan kehidupan untuk bermasyarakat yang merupakan satu fondamental tradisi serta menjadi kebiasaan yang diwariskan ke generasi satu ke generasi selanjutnya, dan mencerminkan eksistensi petuah pendukungnya, sehingga dapat dikatakan kearifan lokal adalah afiliasi pencampuran nilai budaya dengan nilai keyakinan.

Kearifan lokal adalah pangkal nilai penting dalam kehidupan masyarakat diseluruh pribumi dan budaya suku dinegara terinventivitas oleh nilai-nilai dan ide-ide yang mengakar pada keyakinan itu, tumbuh dalam masyarakat, nilai etika, agama dan religious serta spiritual yang memberi pengaruh pada perilaku kehidupan

sosial budaya Nata (dalam Uge. S, Neolaka. A & Yasin, M, 2019, hlm. 378). Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya.

Fungsi Kearifan lokal untuk mengantisifasi, menyaring dan bahkan mengubah berbagai bentuk pengaruh diluar sehingga terus berlanjut ciri komunitas lokalnya (Ratna, 2011). Alwasilah (2009) menjelaskan setiap anggota masyarakat berupaya melakukan transisi terkait gagasan esensial yang berkaitan dengan nilai, kecerdasan serta nilai. Nilai kebudayaan lokal mempunyai keistimewaan sebagai kesatuan kepercayaan dan tindakan bagi setiap masyarakat. Kearifan lokal adalah warisan nasional yang mengandung kearifan atau persepsi dunia, kearifan lokal mempunyai fungsi membentuk individu yang memiliki kepribadian lebih arif dalam tindakanya, selaras dengan penjelasan kearifan lokal berarti suatu interaksi harmonis diantara manusia, alam dan lingkungan, setiap daerah yang tidak terlepas dari pengaruh budaya. Selanjutnya kearifan lokal masyarakat Indonesia mencerminkan hubungan antara Tuhan, manusia dan alam semesta (Hemafitria, Budimansyah, D & Winatapura, 2018). Selaras dengan konsep, tentunya untuk menjaga warisan kebudayaan lokal yang mencerminkan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga kelestarian kearifan lokal Indonesia, tentunya masyarakat diharapkan memiliki partisipasi yang kuat dalam melestarikannya. Wazir, et. al. (1999) partisipasi dipahami sebagai terlibatnya individu secara sadar dalam komunikasi sosial pada waktu tertentu. Dapat dikatakan individu dapat berkomunikasi apabila dia telah mendapatkan dirinya dapat cocok dalam kelompoknya, dengan berbagai cara dapat melakukan komunikasi untuk berbagai hal terkait kepercayaan, adat- istiadat, pandangan, ketaatan, disiplin serta tanggung jawab secara bersama-sama. Morrone (2006) dari UNESCO Institute for Statistics menkonsepkan partisipasi kebudayaan terbagi dari tiga jenis aktivitas mendasar, yaitu menghadiri/menerima kebudayaan atau tradisi yang ada, kinerja / produktivitas yang berbentuk keikutsertaan dan adanya sebuah interaksi. Adapun kearifan lokal yang dimaksud dalam penelitian ini yakni adalah kearifan lokal menurut Sumardjoko (2018) menyatakan kearifan lokal dimaknai sebagai nilai yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, dimana masyarakat sepenuhnya percaya bahkan menjadi pedoman dalam bertindak maupun berperilaku.

Penelitian ini mengarah untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi kearifan lokal masyarakat Melayu di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan kearifan lokal merupakan suatu wujud kebudayaan didalam masyarakat yang lahir karena adanya nilai, adat – istiadat, unsur budaya, serta hukum yang dilestarikan bahkan dijaga keberadaan oleh masyarakat sehingga dapat dirasakan keberadaan hingga generasi ke generasi selanjutnya.

### 2.2.2. Ciri – Ciri Kearifan Lokal

Kearifan lokal dijadikan kontrol sosial bagi masyarakat dalam ruang kehidupan baik yang berkaitan dengan keluarga, saudara dan orang yang terlibat dalam lingkungan yang kompleks serta memiliki cakupan wawasan, budaya dan kecerdasan wawasan lokal, hal ini mengisyartkan kearifan lokal juga sering di kenal dengan *local knowledge*, *local wisdom*, atau *genious local*. Wagiran (2012) menuturkan Pandangannya mengenai Karakteristik dari kearifan lokal sendiri sebagai berikut: (1) *local wisdom appears to be simple*; (2) *it is adapted to comprehensive, diverse*; (3) *it is dynamic and flexible*; (4) *it is tuned to need of local people* (5) *it corresponds with quality and quantity of available resources and* (6) *it copes well with changes* atau dari penjelasan diatas dijelaskan bahwa karakteristik dari kearifan lokal (1) kearifan lokal tampaknya sederhana, tetapi seringkali rumit, komprehensif, beragam, (2) ini disesuaikan dengan kondisi lokal, budaya dan lingkungan; (3) dinamis dan fleksibel ; (4) ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat; (5) ini sesuai dengan kondisi mutu dan kapasitas sumber daya yang tersedia; dan (6) ia mengatasi dengan baik sebuah transformasi. Pandangan lain diungkap oleh Mungmachon (2012, hlm. 174) adapun karakteristik kearifan lokal, yaitu (1) mampu mengelompokan pengetahuan budi pekerti yang membelajarkan orang terkait etika serta nilai moral; (2) kearifan lokal diharapkan membelajarkan seseorang agar mampu melindungi alam, bukan malah merusaknya; (3) kearifan lokal harus lahir dari kelompok etnis yang dituakan. Kedua pandangan ini menekankan hal yang berbeda yakni pandangan Wagiran terkait karakteristik kearifan lokal dari sudut kondisi, kegunaan yang harus fleksibel dan dinamis, sedangkan pandangan Mungmacho dari sudut penghubung mampu menjadi kebajikan mengajarkan kebaikan. Sementara Poespowardojo (dalam Astra,

2004, hlm. 114) secara lugas menuturkan sifat keahliannya kearifan lokal yaitu: (1) dapat semakin kokoh dari gangguan kebudayaan luar (2) mempunyai kekuatan menampung unsur kebudayaan luar, (3) memiliki kekuatan dalam mengkonsolidasi komponen-komponen budaya dari luar menjadi budaya sendiri; (4) mampu mengontrol; (5) memberikan sumbangsi terhadap perkembangan dan kemajuan kebudayaan.

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan karakteristik yang melekat kearifan lokal yakni dinamis dan fleksibel, kearifan lokal harus mampu serta dapat menyesuaikan pengaruh dari budaya luar agar dapat dimanifestasikan kepada bentuk perilaku yang baik serta mampu menghadapi situasi yang baik akibat dari suatu transformasi.

### 2.2.3. Pengertian Era Global (*Globalization*)

Globalisasi berasal dari kata *global* bermakna *universal* yang mana globalisasi mengusahakan terjadinya proses universalisasi, yakni proses pergerakan sistem yang dapat berlaku untuk semua orang diseluruh penjuru dunia, bertujuan agar semua negara mempunyai komposisi yang sama dalam ranah global (Safril, 2015 hlm. 66). Disisi lain Myers & Rivero (2020) menyebutkan globalisasi adalah konsep utama untuk memahami dunia saat ini. Globalisasi sebagai gejala eksklusif dalam sejarah kebudayaan manusia yang semakin berkembang pada masyarakat global dan tidak terlepas dari komponen aktivitas manusia. Hal ini ditandai dengan adanya teknologi informasi serta komunikasi menggerakkan proses akselerasi global dalam setiap aspek terpenting kehidupan. Saefullah (2020) mengklasifikasi terdapat keuntungan dari berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi terhadap manusia antara lain: (1) komunikasi menjadi sangat mudah serta cepat, kemunculan IPTEK menyebabkan sirkulasi komunikasi di penjuru dunia. Globalisasi menghasilkan sebuah tantangan dan persoalan baru yang harus mampu diselesaikan dan dipecahkan sebagai daya upaya pemanfaatan globalisasi bagi relevansi kehidupan. Globalisasi selalu diperbincangkan oleh banyak orang diseluruh dunia (Suneki S, 2012). Lebih lanjut Sri Suneki menjelaskan terdapat ciri-ciri dari sebuah globalisasi diantaranya :

- (1) Modifikasi dalam Konstanta ruang serta waktu. Pesatnya kemajuan internet, telepon genggam dan televisi satelit mengakibatkan koneksi



global terjadi begitu cepat, lajunya arus suatu masa menghasilkan adanya turisme, ini mengakibatkan munculnya kebudayaan yang beragam. (2) ketergantungan antara produk ekonomi dan pasar akibat dari hasil perkembangan perniagaan di kancah internasional. (3) meningkatnya komunikasi kultur dikarenakan berkembang pesatnya teknologi media masa seperti musik, film, yang utama televisi hingga berita serta dunia olahraga mancanegara; (4) permasalahan meningkat terutama dalam ranah publik contohnya dalam ruang lingkup inflasi regional, ketegangan multinasional dan lingkungan hidup.

Selanjutnya globalisasi diartikan bagian dari gejala ekonomi, sosial dan politik yang menghasilkan pro serta kontra yang bersifat positif maupun negatif, sehingga dikatakan globalisasi merupakan sebuah peluang juga ancaman (Winarno, 2009). Pendapat lain menyebutkan globalisasi merupakan ancaman besar bagi identitas, nasionalisme dan pengetahuan lokal (Brooks, 2010; Barakat & Brooks, 2016). Komponen globalisasi masuk tak dapat mengendalikan budaya nasional yang merupakan pancaran kebudayaan lokal bagi daerah Indonesia Sabang dan Marauke (Tobroni: 2012, hlm. 123). Budimansyah, D (2010) mengungkapkan mengenai dampak negatif globalisasi mencakup “semua jenjang kehidupan baik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara beserta cara pandang, tindakan dan prilaku warga negara Indonesia”. Perkembangan arus global juga berdampak pada generasi muda yang mana mengakibatkan mereka kehilangan prilaku yang mencerminkan watak sebagai bangsa Indonesia dan melupakan kebudayaan yang lekat denganya (Astuti dan Rps, 2018). Perkembangan Globalisasi sudah dirasakan pada abad 20 setelah perang dunia II, hal ini mengisyaratkan bangsa harus siap menerima gangguan luar yang menyentuh seluruh aspek kehidupan bangsa dan sedikit banyaknya memberikan pengaruh terhadap personalitas lokal serta tersentuhnya aspek kebudayaan (Alam, RMT & Affandi, 2019).

Dalam artian dapat dikatakan bahwa perkembangan era globalisasi ini juga membawa pengaruh terhadap kebudayaan suatu daerah dalam suatu negara yang dapat mempengaruhi budaya lokal suatu daerah, Senada dengan itu, Rossendrof, 2002; Bloom, et. al: 2014) Faktanya, bentuk sosial dan budaya globalisasi mungkin yang paling luas dan dimensi jangkuan fenomena yang terjauh menghardirkan tantangan bagi negara dan budaya daerah. Hal serupa juga diungkap oleh Pang (2013) dipercaya secara luas globalisasi mengubah politik, kehidupan ekonomi dan

budaya orang-orang dibelahan dunia baik negara maju maupun negara berkembang dan globalisasi mendorong revolusi dan organisasi kerja, produksi barang dan jasa, hubungan antar bangsa dan bahkan budaya lokal. Beberapa ahli diantaranya Francis Fukuyama, Lawrence Harrison, Robert Kaplan, Seymour Martin Lipset, Robert Putnam, Thomas Sowell, dan Samuel P. Huntington menyebutkan berhasilnya suatu negara bergantung pada sejauh mana negara mempunyai kebudayaan yang memiliki perencanaan untuk maju (Harrison, 2000:xiv). Fukuyama mengiyakan pandangan Thurow kemudian menegaskan suatu bangsa maju dan berhasil dalam dunia kompetisi global yaitu bangsa yang mempunyai sikap yang cermat, gigih, memiliki kebersamaan serta totalitas yang tinggi. Berdasarkan pandangannya juga negara maju diantarkan Jepang dan Jerman menguasai budaya yang baik yang memiliki karakteristik “*communitarian capitalism*” yang diyakini lebih superior dibandingkan bentuk “*Individualistic Capitalism*” yang dipunyai Amerika dan Inggris (Fukuyama 1996, hln. 28).

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa globalisasi merupakan fenomena khusus yang terjadi dan berkembang dalam peradaban kehidupan manusia dan semakin dipercepat dengan ditandai oleh arus perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi ciri utamanya serta membawa dampak ke segala dimensi kehidupan baik itu bersifat negatif maupun bersifat positif tergantung bagaimana individu, kelompok masyarakat memaknai globalisasi serta memanfaatkan globalisasi ini menjadi sebuah peluang bukan sebagai ancaman, karna pada dasarnya perkembangan kehidupan dalam berbagai aspek apapun tidak dapat terlepas dari suatu arus globalisasi.

#### **2.2.4. Karakteristik Era Global (*Globalization*)**

Proses globalisasi yang sebenarnya dicirikan kepada pengaruh terbentuknya global society, Hal ini semakin dipertegas Sadegh (1995, hlm. 90- 95) pada dasarnya terlihat dengan adanya beberapa tendensi diantaranya: (1) berubahnya konsepsi waktu dan ruang; (2) kecepatan peningkatan komunikasi sosial; (3) adanya permasalahan yang sama diseluruh penjuru dunia; (4) adanya ketergantungan serta hubungan yang pesat dan semakin meningkat. Sedangkan satu ciri dari globalisasi menurut Mastuhu (1999: 275) yakni invitasi, sebagai media

dalam memimpin sebuah kompetisi harus ada unsur unggul. Selaras dengan konsep Heri (2018) memaparkan karakteristik dari globalisasi karena yakni a) Perkembangan dari sudut pandang konsepsi dan waktu serta ruang diimbangi dengan sokongan teknologi berupa Tv, Handphone serta internet dapat dikerjakan dengan lebih mudah begitupa informasi dari negara lain dapat terkonver dengan jelas; b) berkembang luasnya perdangan dikancah internasional dan adanya kelompok organisasi seperti WTO atau world trade Organization yang menaungi perdagangan dunia menyebabkan timbulnya keterlibatan bidang ekonomi dan perdangan; c) meningkatnya komunikasi kultural dengan cara masyarakat mendapat kecerdasan baru dan lebih mengenal kebudayaan diluar negaranya melalui media maupun televise; d) terjadinya peningkatan masalah dalam kapasitas besar yang merupakan dampak global masalah ham, lingkungan hidup, kejahatan perang yang terjadi di suatu negara. Yang perlu mendapat perhatian khusus bagi seluruh negara dunia.

Sedangkan Hamijoyo dalam Lalo (2018), ciri-ciri dari sebuah globalisasi antara lain:

1. Arus globalisasi telah melewati durasi geopolitik. Dimana durasi ini mengharuskan mengikuti power teknologi, sosial, politik, ekonomi bersamaan mengenalkan konstelasi yang rumit di satukan.
2. Globalisasi memerlukan dukungan percepatan informasi, kemajuan teknologi, transportasi serta proses komunikasi yang diimbangi jajaran organisasi dan perencanaan manajemen yang baik.
3. Munculnya depedensi antar suatu negara.
4. Pendidikan seyogyanya adalah satu komponen global, dimana dalam proses pelaksanaan dan menyebarnya melalui pemikiran, diperbaharui dan diadakan terobosan dalam ruang lingkup metode, isi, dan perencanaan sebelum di belajarkan kepada peserta didik.

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan di atas dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwa karakteristik dari sebuah terjadinya globalisasi yakni perkembangan ruang dan waktu, meningkatnya permasalahan secara bersama, terjadinya ketergantungan antara dengan satu dengan negara lain, dan perkembangan yang pesat yang ditandai dengan kecangihan teknologi secara luas.

## 2.3 PEMBELAJARAN PKn

Kajian berkaitan dengan Pembelajaran PKn dalam penelitian ini memaparkan hal yang berkaitan dengan konsepsi tinjauan tentang Pengertian PKn serta tujuan dan fungsi PKn secara umum dan khusus sebagai Mata Pelajaran di Sekolah baik berupa tujuan, visi beserta misi beberapa poin tersebut akan dibahas sebagai berikut :

### 2.3.1 Pengertian Pendidikan kewarganegaraan

Pada hakikatnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang wajib ada didalam kurikulum untuk semua tingkat pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah, menengah atas hingga jenjang perguruan tinggi. Hal ini, ditegaskan dalam Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37, sebagai berikut :

Kurikulum pendidikan dasar, maupun menengah wajib memuat (a) pendidikan agama, (b) pendidikan kewarganegaraan, (c) bahasa, (d) matematika, (e) ilmu pengetahuan alam, (f) ilmu pengetahuan sosial, (g) seni dan budaya, (h) pendidikan jasmani dan olahraga, (i) keterampilan kejuruan, (j) muatan lokal. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat (a) pendidikan agama, (b) pendidikan kewarganegaraan, (c) bahasa.

PKn merupakan perencanaan pendidikan yang memfokuskan untuk menghasilkan warga negara yang mampu mengemban hak serta kewajibannya secara seimbang. PKn diajarkan baik pada jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi. PKn diakui sebagai tanggung jawab utama pendidikan formal di sekolah umum, tingkat dasar dan menengah serta di perguruan tinggi, (Melville, Dedrick, & Gish, 2013). Dari penjelasan di atas jelas, PKn merupakan mata pelajaran yang wajib ada di semua jenjang pendidikan serta mempunyai tempat khusus yang harus ada di sekolah. Senada dengan itu Bianchini & Morandini (2017) mengungkapkan reformasi tahun 1958 mengakui sifat ganda dari PKn yang dipandang sebagai subjek interdisipliner yang menyeluruh( menjadi tugas masing- masing guru untuk mempromosikan pemeriksaan diri moral dan sosial pada siswa) sebagai subjek akademik yang terpisah, mengingat bahwa presentasi analitik dan organik dari materi pembelajarannya membutuhkan penunjukan kerangka waktu tertentu dalam jam sekolah. Selain itu mata pelajaran PKn mengemban tugas berat dalam pembentukan watak maupun prilaku warga negara yang harus bercermin pada nilai

Pancasila sebagai ideologi negara, sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 22 tahun 2006 tentang Standar isi ditegaskan :

“PKn adalah mata pelajaran yang dipusatkan untuk membentuk warga negara yang mengetahui serta mampu melaksanakan hak dan kewajibannya dalam upaya menjadi warga negara Indonesia yang memiliki keterampilan, karakter dan cerdas yang termaktub dalam Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945”.

Konsep lain menyebutkan PKn mengajarkan sistem nilai di masyarakat. Nilai adalah nilai aktual suatu benda atau benda itu juga merupakan nilai pribadi semata, seperti seberapa penting seseorang menganggap tertentu hal- hal, kepercayaan, prinsip atau ide yang di lekatkan orang pada hal- hal berdasarkan pada nilainya, siswa mengajarkan beberapa nilai seperti nilai integritas, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, patriotisme, dan lain- lain. Mengetahui pentingnya suatu sistem nilai mereka seperti pemilihan pengambilan keputusan dan bagaimana hal itu memungkinkan individu untuk bertindak sesuai dengan sistem nilai kita seperti membuat keputusan dan itu memungkinkan individu untuk bertindak sesuai dengan sistem nilai dengan nilai- nilai kita (Balogun & Yusuf, 2019). Haiman (2018) umumnya pembentukan karakter dipengaruhi oleh dua faktor yaitu lingkungan dan diri individu itu sendiri.

Merujuk konsep diatas PKn menjadi sistem nilai untuk mengajarkan nilai-nilai yang sesuai dengan Ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila. Senada dengan itu Sumardjoko & Musyiam (2018) menjelaskan PKn adalah satu instrumen dalam menggapai tujuan pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan mengajarkan siswa untuk menjadi warga negara baik dan bertanggung jawab berasaskan nilai- nilai dasar Pancasila, demikian PKn pada dasarnya adalah praktis Pancasila. PKn mengajarkan seorang siswa bagaimana menjadi warga negara yang baik dan mengajarkan mereka menjadi baik secara umum, (Maloyed & Williams, 2013). Engle & Ochoa (1988) juga memaparkan yakni warga negara merupakan kelompok bangsa yang ditetapkan secara hukum. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara (Pasal 1 poin 2 UU No.12 Tahun 2006). Terkait, Perspektif kelompok dari bagian sebuah negara, dapat di jelaskan kewarganegaraan yakni terjalinya komunikasi antara warga negara dan negara secara berkesinambungan yang menyebabkan adanya rasa tanggung jawab dan hak

tertentu, yaitu hak untuk di dengarkan, ikut berpartisipasi dalam pemerintah, hak atas perlindungan hukum yang sejajar dan hak kebebasan beragama serta mengemukakan pendapat (Doganay, 2012). Winataputra (2001,2015) mengungkapkan pandangannya, PKn dari sudut pandang psikopedagogis dan sosiokultural dipersiapkan, diimplementasikan serta dilakukan evaluasi terkait sudut pengembangan pengetahuan kewarganegaraan (*civic intelligence*) yang secara kognitif terwujud pada penguasaan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), perwujudan sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*), penampilan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) yang keseluruhan komponen tadi terpancar dan menghamblur menjadi keadaban kewarganegaraan (*civic virtues/civility*). Segenap komponen kemampuan tadi sangat dipercayai yang dijadikan bekal bagi warga negara agar menyadari, menerapkan, melaksanakan keikutsertaannya sebagai warga negara (*civic participation*) sebagai wujud dari tanggung jawab kewarganegaraan (*civic responsibility*).

Winataputra & Budimansyah menegaskan (2012, hlm. 11) bahwa praktek PKn dikategorikan dalam jenis aktivitas belajar dalam bentuk struktur sekolah pada lembaga formal, dalam hal ini *civic education* menduduki posisi sebagai mata pelajaran dasar bertujuan menyiapkan warga negara maupun kaum muda yang mampu berperan aktif nantinya dalam masyarakat. Di sisi lain, Wahab, Abdul Aziz dan Sapriya (2011, hlm. 15) menyatakan sejak tahun 1968 *civics* dan PKn mulai di terapkan pada kurikulum sekolah di Indonesia yang memiliki tujuan untuk membentuk warga negara yang baik dimana warga negara ini diharapkan mengerti hak dan kewajibannya. Ranah teoritik PKn adalah pengembangan wujud dari mata pelajaran *civics* yang berorientasi pada pelajaran orang dewasa dan orientasinya terletak pada praktek kewarganegaraan. PKn merupakan pembelajaran yang berasaskan demokrasi, yang tujuan akhirnya melakukan pelatihan kepada peserta didik untuk mengelola daya pikir kritisnya, analisis dan berbuat demokratis berprinsipkan Pancasila dan UUD 1945 guna menyiapkan hidup demokratis (Cholisin, 2000, hlm. 8).

Selaras dengan konsep, PKn pada tingkatan tertentu mendukung hukum atau lembaga politik yang ada, (Macmullen, 2011). Program Pendidikan Kewarganegaraan pada umumnya berupaya memberikan warga negara

pengetahuan tentang bagaimana proses politik bekerja, mendorong partisipasi aktif warga negara, dan untuk menanamkan nilai-nilai seperti toleransi dan dukungan untuk kebebasan setiap individu, (Finkel, Horowitz, & Mendoza, 2012). Pendidikan Kewarganegaraan juga mencakup nilai, pengetahuan, serta keterampilan pada kondisi kehidupan kongkret dengan suatu keharusan ikut berpartisipasi secara aktif dan lebih luas dari cakupan nilai dan keterampilan serta pengetahuan (Dogonay, 2012). Hoskins, Saisana, & Villalba (2015) mengungkapkan bahwa PKn mengajarkan pemikiran kritis dan dalam konteks politik dari demokrasi yang panjang dan untuk meningkatkan keadilan sosial dan pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan. Selain itu, PKn juga dapat mendorong warga negara untuk mempertimbangkan peran aktifnya dalam kehidupan politik masa depan, (Zhu, Kuang, Kennedy & Mok, 2018). Pendidikan kewarganegaraan dapat melengkapi peserta didik dengan alat yang diperlukan untuk keterlibatan dalam kehidupan bermasyarakat dan berpolitik, (Clark, 2016). Secara Instrumental visi, misi dan konsepsi cakupan PKn telah mencakup keseluruhan pengintegrasikan nilai, filsafat serta moral Pancasila dengan seluruh prinsip psikopedagogis dan sosial-kultural terkait dalam membudayakan Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. (Winataputra:2012).

Menurut Cogan (1998, hlm. 4; Rachmadtullah, 2015), *Civic education* sebagai “...*the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in the adult lives*”, berarti PKn merupakan pelajaran dasar yang ada dipersekolahan dimana tujuannya menyiapkan individu muda yang mampu berkontribusi aktif dalam pemerintahan ketika nantinya ia dewasa. Merujuk pendapat yang dikemukakan Cogan dapat diambil kesimpulan PKn sebagai pelajaran dasar yang harus di ajarkan dalam semua ruang lingkup jenjang pendidikan yang membentuk warga negara yang mampu aktif dalam kegiatan negaranya, sehubungan dengan konsep *Education Commision* (2017) mengungkapkan terdapat empat katagori kompetensi kewarganegaraan yang harus dimiliki warga negara yakni “...*Civic content knowledge, Intellectual civic skills, Participatory civic skills and civic dispositions* atau pengetahuan konten masyarakat, keterampilan kewarganegaraan intelektual, keterampilan kewarganegaraan partisipatif dan watak kewarganegaraan” hal serupa semakin

dipertegas oleh Branson (1998; Pangalila, 2017) yang juga mengungkapkan terdapat tiga komponen PKn yang baik, yaitu: 1) Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*), berasosiasi tentang pengetahuan yang harus diketahui seorang warga negara; 2) Kecakapan Kewarganegaraan (*Civic Skill*), berasosiasi tentang kepandaian intelektual serta kemampuan seorang warga negara melakukan partisipatoris secara relevan; 3) Watak Kewarganegaraan (*Civic Disposition*), berasosiasi pada karakter atau kepribadian individu secara luas dalam pengembangan, perlindungan demokrasi konsitusional.

PKn yang ingin dilihat dalam penelitian ini yakni PKn yang mampu membentuk nilai yang berujuk pada prilaku warga negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, Maftuh (2008, hlm. 137; isep, 2013) memberikan pandangannya, desakan sebuah perkembangan zaman, serta kemajuan sebuah negara bahkan masyarakat yang maju dan berbagai tantangan lainnya mengisyaratkan PKn mempunyai misi yang diselaraskan dengan kondisi saat ini, yaitu Pkn dimaknai: (1) PKn merupakan Pendidikan Politik, (2) Pendidikan Nilai, (3) Pendidikan Nasionalisme; (4) Pendidikan Hukum; (5) Pendidikan Multikultural; dan (6) Resolusi sebuah Konflik. Dengan kata lain, PKn dijadikan sebuah wahana pengembangan sekaligus melestarikan nilai dan moral para leluhur yang berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia sendiri, harapannya dapat diimplementasikan yang berwujud karakter, prilaku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila dan UUD 1945 yang dijadikan dasar Landasan PKn bersumber dari nilai agama, budaya bangsa Indonesia bersifat luwes serta fleksibel terhadap desakan perkembangan zaman (Fatimah, Kiptiah & Nur Fajril, 2014). Maka individu, masyarakat sebagai warga negara diupayakan untuk dapat bermakna serta bermanfaat untuk nusa dan bangsanya serta mampu menyaring, membentengi diri terhadap arus perubahan sosial dimasa mendatang.

Untuk itu, perlunya pembekalan pengetahuan, teknologi dan seni yang berasaskan nilai keagamaan, moral dan budaya, dimana nilai tadi berperan sebagai pedoman dan pegangan hidup warga negara untuk menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara (Sukarno, 2015, hlm. 7).

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan di atas dapat di ambil sebuah kesimpulan PKn atau *civic education* pada hakikatnya merupakan mata pelajaran



yang wajib ada disemua tingkat pendidikan di sekolah yang mengemban misi sebagai pendidikan nilai untuk membentuk moral atau prilaku warga negara, individu, kelompok masyarakat sejalan dengan nilai- nilai luhur Pancasila serta mampu untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

### **2.3.2 Tujuan Pendidikan kewarganegaraan**

A. Kosasih (dalam Noviatasari, 2008. hlm. 20) mengungkapkan tujuan umum pembelajaran PKn yakni mendukung terlaksananya keberhasilan Pendidikan Nasional untuk mencemerlangkan kehidupan suatu bangsa dan membentuk kepribadian manusia Indonesia yang utuh tercermin pada tindakan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak pekerti mulia, mempunyai pengetahuan serta kecakapan yang baik, sehat secara jasmani maupun rohani dan memiliki personalitas yang mampu mandiri dan bertanggung jawab di semua jenjang kehidupan. Sedangkan, Tujuan khusus PKn dirancang untuk Pembinaan moral yang diinginkan dapat terwujud pada praktek kebiasaan hidup sehari- hari, ditandai dengan sikap ketakwaan dan pancaran keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa ditengah banyaknya perbedaan keyakinan, dapat bersikap adil terhadap sesama manusia, sikap yang mampu berkontribusi dalam upaya kesatuan bangsa ditengah keanekaragaman masyarakat yang homogen, prilaku yang mengedepankan kepentingan golongan diatas kepentingan pribadi serta perbedaan pandangan, cara pikir yang dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat dan sikap yang mampu berkontribusi upaya menciptakan suatu keadilan sosial terhadap semua warga negara Indonesia. Dari konsep diatas mengisyaratkan tujuan PKn yaitu pembentukan individu maupun warga negara yang memiliki sikap tanggung jawab, mandiri dan memiliki prilaku yang mencerminkan nilai- nilai yang termaktub pada sila- sila Pancasila.

Pendapat lain menyebutkan, tujuan PKn adalah untuk membuka kesempatan yang lebar terhadap warga negaranya, yang berani berprasetia untuk melaksanakan fungsinya secara total dalam mematangkan kepribadianya terkhusus yang berhubungan dengan moral, hukum serta hubungan dan fungsi kewajiban warga negara, lembaga publik dan satuan organisasi suatu negara. Perawakan seorang warga negara baik yang dicita- citakan oleh PKn yakni warga negara yang dapat hidup secara mandiri dan tidak bergantung keada orang sekitarnya terlibat

pada aktivitas menuntut ilmu, menguasai ruang lingkup sejarah, cita-cita dan tujuan negara dan berperan aktif dalam mengembangkan keamanan, perekonomian, ketertiban serta ketentraman umum. Dari paparan konsep, secara sederhana Tujuan PKn yang diutarakan bertujuan membina dan merancang peserta didik menjelma sebagai warga negara yang baik (Isep, 2013). Rosyada, dkk (2000: 10) tujuan dari PKn diantaranya sebagai berikut: (1) mengasah pembentukan keahlian berpartisipasi yang unggul serta memiliki tanggung jawab politik serta kemasyarakatan di ranah global, nasional dan lokal; (2) Mewujudkan warga Mampu membentuk warga negara khususnya generasi muda menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab (*good and responsible citizen* dengan cara menanamkan moral dan membentuk keterampilan (*social skills*) agar nantinya mereka dapat menafsirkan serta menyelesaikan permasalahan actual dalam ruang lingkup kewarganegaraan toleransi, perbedaan pandangan, saling toleransi, perbedaan pendapat, bersikap simpati, menghargai integritas, sadar akan hukum dan kedisiplinan sosial, mengedepankan HAM, menumbuh kembangkan demokratisasi dalam segala jenjang kehidupan serta mencintai kearifan lokal (*local wisdom*).

Pandangan Wahab & Sapriya (2011, hlm. 35) memaparkan tujuan PKn sama halnya dengan negara demokratis pada umumnya, PKn di Indonesia dirancang untuk mempersiapkan warga negara demokratis yakni warga negara yang berpengetahuan dan mampu menggunakan keterampilan dan pengetahuan yang ia miliki sebagai penunjang memajukan dirinya dan lingkungan sekitarnya. Disisi lain Suharyanto (2013) memandang PKn memiliki fungsi: a) Pengembangan sekaligus pelestarian akhlak Pancasila secara berkepanjangan dan transparan, hal ini mengisyaratkan bahwa akhlak serta nilai-nilai Pancasila yang di terapkan dapat mengatasi banyaknya tantangan serta perubahan dalam masyarakat, tanpa kehilangan identitas sebagai bangsa Indonesia; b) Pengembangan dan pembinaan manusia yang utuh, peka terhadap politik serta konsitusi yang berasaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945; c) Pembinaan terhadap pemahaman dan kepekaan mengenai interaksi sesama warga negara dan pentingnya pendidikan bela negara sebagai wujud kepatuhan terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Lebih lanjut beliau menegaskan, tujuan PKn adalah upaya untuk menyelami dan mengerti makna yang tersemat di dalam Pancasila dan UUD 1945 dalam

pembentukan warga negara yang berkarakter baik termaktub dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Singkatnya, PKn merupakan suatu pendidikan yang berupaya dalam mengembangkan kepribadian anak yang tujuannya membentuk warga negara Indonesia utuh sesuai dengan kepribadian yang berasaskan nilai- nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Tujuan PKn tidak hanya memiliki tujuan yang umum saja namun PKn juga memiliki tujuan sebagai mata pelajaran disekolah sebagaimana diungkap dalam Depdiknas No 20 Tahun 2006 bertujuan agar siswa:

- (1) Mempertimbangkan secara teliti, logis dan inovatif dalam memahami sebuah isu kewarganegaraan.
- (2) Berkontribusi secara aktif, konsisten dan berbuat secara cerdas dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa serta negara dan menjauhkan diri dari tindakan korupsi.
- (3) Membentuk diri secara demokratis dan positif berlandaskan karakter bangsa Indonesia sehingga mampu hidup berdampingan dengan bangsa lainya.
- (4) Berkomunikasi secara kompeten dengan bangsa lain, agar mampu berpartisipasi terhadap peraturan dunia baik langsung ataupun tidak langsung menggunakan kecanggihan teknologi komunikasi beserta informasi.

Soemantri (dalam Ruminiati 2007, hlm. 125) tegas mengungkapkan PKn merupakan mata pelajaran sosial yang berupaya melakukan pembinaan menjadikan warga negara yang baik atau *good citizens*, Pkn dimaknai sebagai wahana dalam membentuk individu menjadi warga negara yang mampu bertindak, berfikir dengan baik (*good and smart citizens*). Selanjutnya Soemantri Mempertegas dalam Abdul Aziz Wahab dan Sapriya (2011, hlm. 312) menyatakan bahwa tujuan PKn dapat dirincikan di dalam tujuh kuriluler mencakup: (1) Disiplin pengetahuan yang meliputi konsep, fakta serta abstraksi; (2) Kapasitas intelektual, mulai dari kecakapan sederhana sampai pada kecakapan menyeluruh dari penyidikan sampai pengambilan keputusan resmi, dari pemikiran kritis sampai pada pemikiran kreatif; (3) karakter yang mencakup nilai, sensitivitas perasaan; (4) kompetensi umum.

Dalam kaitanya untuk menciptakan tujuan PKn yang dirinci dalam tujuh kurikuler yang harus diimplikasikan dalam proses pembelajaran membutuhkan strategi untuk dapat mencapai tujuan tersebut, Praktik yang baik untuk PKn

sebelum munculnya kewarganegaraan ideal ini, yang membutuhkan penguasaan dan bukan hanya pengetahuan, serta keterampilan, keahlian, sikap dan perilaku, perlu untuk mengubah model pengajaran dan pembelajaran tradisional di kelas. Jadi, meski kita mengandalkan yang penting berlatar belakang teoritis untuk pendidikan warga negara (khususnya melalui dasar tentang konsepsi dan kurikulum), masih ada beberapa studi tentang penerapan pedagogisnya khususnya apa yang terjadi di dalam kelas (Hans, 2016; Zuniga, et. al, 2019). Huang & Chen (2013) menitikberatkan tujuan PKn adalah untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap positif pada siswa, untuk melaksanakan tanggung jawab mereka terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan.

Praktik PKn yang diajarkan seharusnya bukan hanya dapat menciptakan pengetahuan maupun keterampilan tetapi juga mengedepankan keterampilan pengajaran di kelas, pembaharuan model pengajaran yang awalnya tradisional dapat pula bersinergi pada pembaharuan sesuai perkembangan zaman khususnya dunia yang menghadapi era global yang terdepan dengan meluasnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjadikan warga negara yang terampil serta mampu berfikir global bertindak lokal. Seperti yang dikemukakan oleh Cogan (1999) mengidentifikasi perlunya warga Negara mempunyai delapan spesifikasi sebagai gambaran warganegara yang ideal pada abad ke 21 sebagai berikut:

1. Keterampilan untuk mengetahui serta mengakrapi permasalahan sebagai wujud bagian dari masyarakat global.
2. Keterampilan bekerja sama secara responsif dengan orang lain dan bersedia bertanggung jawab terhadap tugasnya dalam bermasyarakat.
3. Kemampuan menginterpretasikan, mengakui, menghormati serta dapat memahami divergensi perbedaan budaya.
4. Kemampuan menganalisis secara kritis dan terorganisir.
5. Kehendak untuk mengatasi sebuah konflik tanpa kekerasan.
6. Kehendak untuk memperbaiki kebiasaan hidup dari gaya konsumtif sebagai upaya perlindungan lingkungan.
7. Kemauan bersikap sensitif dalam upaya perlindungan HAM.

8. Keinginan untuk berkontribusi terhadap pelaksanaan politik di jenjang lokal, nasional, dan internasional.

Sejalan dengan itu, Evans et, al (2009 ; Toukan, 2018) mengungkapkan PKn global biasanya dikaitkan dengan berbagai hasil pembelajaran itu termasuk sebagai berikut : belajar tentang tema, struktur, dan sistem global, identitas dan keanggotaan berfikir dunia, hak dan tanggung jawab dalam konteks global, keberagaman keyakinan dan nilai-nilai kapasitas literasi kewarganegaraan kritis mengelola dan memahami konflik pertimbangan hak istimewa kekuasaan dan keadilan sosial dan akhirnya aksi sosial kehadiran, penekanan dan hubungan di antara tujuan- tujuan pembelajaran ini mungkin berbeda secara signifikan diantara mereka program yang diberikan. Transformasionalisme dimana pemahaman tentang globalisasi memiliki banyak segi sepanjang garis budaya, sosial, lingkungan, politik dan ekonomi, transformasionalisme membutuhkan pola baru inklusi dan eksklusi dan erosi hierarki dari seorang transformasionalis perspektif warga dunia memahami dirinya sendiri sebagai seorang memiliki hubungan yang rumit dengan manusia dan masalah yang melintas batas negara dan mengambil tindakan yang sesuai. Hubungan pribadi ini dengan semua orang lain mencerminkan pemahaman bahwa untuk menciptakan komunitas lokal dan global yang adil, demokratis dan berkelanjutan warga negara harus memahami hubungan mereka dengan semua orang lain melalui kemanusiaan yang sama, lingkungan yang bersama dan minat serta kegiatan bersama (Shultz,2007, hlm. 249; Toukan, 2018). PKn dapat dikatakan efisien dan bertransformatif apabila dapat mengakomodasi peserta didik untuk dapat berperan aktif terhadap komunitas budaya negaranya, bangsanya serta wilayahnya juga terhadap kelompok global (Banks,2008).

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan di atas dapat di ambil sebuah kesimpulan tujuan dan fungsi PKn sebagai pendidikan yang pembinaan dalam mencetak warga negara cakap, kompeten, cerdas, demokratis sesuai dengan tujuan pendidikan nasional serta mampu menempatkan diri dalam segala ruang lingkup kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ditengah arus perkembangan zaman.

### 2.3.3 Visi dan Misi Pendidikan kewarganegaraan

Pada internal kalangan masyarakat, kelompok akademisi PKn (*civic/citizenship education*) di Indonesia juga di negara lain mengartikan tujuan

PKn adalah upaya pendidikan dalam pembentukan dan pembinaan warga negara yang baik (*to be good citizens*) hal ini diungkap (Wahab, 2011). PKn di Indonesia merupakan disiplin ilmu yang bertujuan membentuk peserta didik menjadi warga negara Indonesia yang peka akan hak dan kewajibannya, cerdas, terampil, demokratis, dan berkarakter seperti yang di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk mewujudkan tujuan dari PKn maka diperlukan adanya suatu visi dan misi.

Visi merupakan serangkain istilah yang mengarah pada keinginan, cita- cita atau nilai yang bermakna suatu harapan sekumunitas orang secara khusus terhadap pemikiran yang jauh ke masa depan untuk menggapai suatu tujuan yang diimpikan. Wahab & Sapriya (2011) memberikan pandangannya, bahwa PKn memiliki visi untuk *nation and character buiding*. Dari pandangan tersebut secara umum bahwa visi PKn adalah untuk membangun bangsa dan karakter bangsa. Sejalan dengan konsep pengantar bukunya Winata putra & Budimansyah (2012) menyatakan bahwa PKn (*civic education*) merupakan subjek pelajaran dalam mengemban visi untuk membina budi pekerti bangsa sebagai daya upaya kongkret terhadap “*nation and character building*”. Presiden Soekarno salah satu *founding fathers* bangsa dan negara Indonesia dalam upaya pembentukan karakter bangsa beliau menegaskan pembangunan karakter harus menjadi prioritas dalam upaya membangun bangsa, hal ini karena pembangunan karakter akan mengantarkan Indonesia menuju negara yang hebat, maju, makmur dan bermartabat (*a great, advanced, and prosperous and dignifiednation*) (Apriyani & Widyasari, 2019, hlm. 143).

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan secara umum visi dari PKn di Indonesia adalah untuk membangun bangsa dan karakter bangsa berdasarkan serta sesuai dengan ideologi Pancasila, konstitusi serta konsep negara demokratis. Sedangkan dalam konteks negara demokratis PKn memiliki visi sebagai wahana internalisasi cita-cita, nilai, ide, keyakinan, sikap serta kompetensi dalam setiap diri warga negara mengenai pendekatan substansi, pedagogis, dan sosio-kultural agar terbangun pengalaman hidup dan berkehidupan demokrasi. Hal ini selaras dengan pandangan Print el,al (1999, hlm. 25) sebagaimana visi PKn yakni “ *civic educations is necessary for the building and consolidations of a democratic*

*society*” yang berarti PKn dibutuhkan dalam pembangunan serta konsolidasi masyarakat demokratis.

Misi merupakan langkah atau cara untuk meraih suatu tujuan, sasaran yang menjadi suatu visi yang hendak dicapai. Sebagaimana yang diungkap Winataputra (2015, hlm. 282 dalam Batubara & Darmawan, C: 2017) menjelaskan “ PKn mengemban misi multidimensional atau *multidimensional citizenship* yang mana PKn mempunyai misi membentuk budaya kewarganegaraan sebagai satu determinan kehidupan yang demokratis berlandaskan Pancasila (*misi sosiokultural*)” yang berarti PKn memiliki misi dalam menumbuhkan budaya yang menunjang kewarganegaraan yang berisikan sepenggalan cita- cita, diwujudkan secara tegas melalui delegasi budaya sebagai upaya membentuk karakter warga negara. Sedangkan, secara epistemologis Pkn dimaknai sebagai suatu *integrated knowledge system* yang mengemban misi membentuk potensi peserta didik guna memiliki *civic intelligence*, *civic responsibility*, dan *civic participation* sebagai individu dalam konteks watak dan peradaban yang berasaskan Pancasila (Hotimah 2012, hlm. 324).

Selanjutnya Budimansyah, D (2006) memberi pemaparan bahwa PKn merupakan salah satu bidang kajian yang memiliki tanggung jawab penuh dalam mencapai misi nasional yakni mencerdaskan kehidupan suatu bangsa melalui ranah “*value based education*” kerangka tersebut berdiri melalui beberapa asas dasar paradigma yakni: (1) PKn dari sudut pandang kurikuler, di persiapkan sebagai subjek pelajaran yang memiliki tujuan menumbuhkan kemampuan setiap orang untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang berkarakter mulia, cerdas,berpartisipasi dan memiliki tanggung jawab; (2) PKn dari sudut pandang teoritik, dipersiapkan sebagai subjek pelajaran yang mencakup aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan memiliki karakteristik intrusi serta berintegrasi dalam ruang lingkup esensi, pemikiran, nilai, konsepsi dan akhlak Pancasila, bela negara dan kebangsaan yang demokratis; (3) PKn dari sudut pandang pragmatif dimaknai sebagai subjek pelajaran yang memberikan penekanan terhadap *content embedding values* (sebuah konten yang bermakna nilai) dan *learning experiences* (aktivitas suka duka dalam belajar) melalui wujud beragam tindakan yang diimplementasikan dalam kebiasaan hidup sehari hari dan merupakan pandangan hidup warga negara

dalam berperilaku dalam ruang lingkup masyarakat, bangsa dan negara, juga merupakan pemerincian esensi, pemikiran, nilai, konsepsi dan akhlak Pancasila, bela negara dan kebangsaan yang demokratis.

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan secara umum misi dari Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dimana PKn sebagai pendidikan yang berbasis nilai yang diharapkan dapat membangun serta membentuk identitas warga negaranya melalui seperangkat ide, gagasan dalam representasi kebudayaan serta sebagai subjek pembelajaran dalam mengembangkan kecakapan warga negara yang tidak terlepas dari konsepsi dan akhlak Pancasila, bela negara dan kebangsaan yang demokratis.

#### **2.4 PENELITIAN TERDAHULU TENTANG TRADISI SAPRAHAN**

Peneliti mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian yang akan diungkap, dibahas, dikaji dan dianalisis. Penelitian relevan yang telah dilakukan sebelumnya sangat bermanfaat untuk peneliti dalam memberikan sumbangsi sesuatu yang baru (*novelty*) dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian relevan terdahulu yang dimaksud, yakni:

Penelitian yang telah dilakukan Fathan Mun'in pada tahun 2017 terkait keberadaan tradisi asya'rakalan dan makan besaprah dalam acara perkawinan di lihat dari aspek ekonomi Islam, studi bersifat deskriptif dengan analisis kualitatif yang menghasilkan beberapa temuan penting: (1) sebab utama tradisi asya'rakalan dan makan besaprah masih lestari disebabkan unsur budaya, berwujud kemauan yang kuat dari masyarakat menjaga tradisi ini, sebab lainya masyarakat masih menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan menghargai, serta adanya dukungan yang nyata dari tokoh masyarakat dan budaya dalam mendukung pelestarian tradisi asya'rakalan dan makan besaprah, terakhir kedua tradisi ini juga mempunyai keterkaitan satu sama laing dan juga dipengaruhi oleh unsur agama islma atau kayakinan yang dianut masyarakat setempat Melayu Sambas; (2) pelaksanaan tradisi asya'rakalan dan makan besaprah pada hakikatnya bersumber dari kitab terdahulu nenek moyang yakni kitab al-Barzanji; (3) kontribusi masyarakat, pemerintah daerah dan tokoh adat terhadap lestarnya tradisi ini bersifat kontinyu yang berwujud pelaksanaan perlombaan pembacaan Zikir Maulud terdapat pasal tersendiri dalam kitab al- al-Barzanji; (4) nilai yang dimuat tradisi asya'rakalan dan



makan besaprah di lihat dari aspek ekonomi Islam berupa rasa tolong menolong, mengedepankan kepentingan sosial, terjalinya silaturahmi secara berkesinambungan dan berkembang pesatnya *sector rill* berupa meningkatkannya usaha pembuatan tempat tarub acara saprahan dan *sound system* dan tanjidor banyak di cari masyarakat untuk mendukung pelaksanaan asya'rakalan dan makan besaprah dalam masyarakat di kabupaten Sambas.

Selanjutnya, Abdul Wahab pada tahun 2017 penelitiannya terkait nilai Islam dan hubungan sosial dalam tradisi besaprah masyarakat Sambas setelah konflik Melayu Madura, metode kualitatif dengan pendekatan etnografi yang menghasilkan temuan penting bahwa untuk mengatasi konflik yang terjadi dua suku dengan pemberdayaan nilai kearifan lokal tradisi saprahan yang mempunyai peluang dalam konsepsi pendidikan Islam dengan tindakan yang dapat dilakukan yaitu transformasi budaya melalui pengajaran yang tidak menentang kearifan lokal menggunakan cara internalisasi dan menguatkan filosofi hidup yang didasarkan pada tradisi sebagai sumber perubahan serta keterampilan yang dapat diterapkan dalam ruang lingkup keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat dalam kontek pendidikan Islam.

Kemudian Penelitian yang telah dilakukan Alif Alfin Syahrin dan Tresna Dwi Nurida pada tahun 2018 terkait eksistensi bahasa Melayu Sambas dalam kebudayaan makan besaprah, penelitian kualitatif menggunakan studi deskriptif yang menghasilkan beberapa temuan penting: (1) budaya makan besaprah masyarakat Melayu Sambas merupakan kebudayaan makan bersama dalam bentuk melingkari hidangan yang akan dinikmati dengan jumlah orang 6 (enam) orang sembari duduk bersama dilantai( beselak ) pada saat acara perkawinan, khitanan maupun upacara- upacara adat lainnya. eksistensi budaya makan besaprah pada masyarakat Melayu Sambas sudah menjadi keharusan untuk dilaksanakan oleh masyarakat Melayu Sambas jika pada suatu acara pernikahan tidak dilakukan budaya makan besaprah melainkan dengan prasmanan maka akan dianggap suatu keanehan dan menyalahi nilai dan norma yang ada; (2) hubungan bahasa Melayu Sambas terhadap budaya makan besaprah yaitu bahasa Melayu Sambas adalah bahasa Melayu yang berdialek Sambas dalam masyarakat Melayu Sambas tidak dapat dipisahkan dengan penggunaan bahasa daerah Melayu Sambas dalam sehari-

hari, karena kalangan pemuda maupun anak-anak masih tetap menggunakan bahasa Melayu Sambas dalam keseharian, terkadang dikalangan muda terdapat pepatah “*usah nak ngomong bahase laing, mun taek munekmu maseh diSambas*”, artinya jangan berbicara bahasa menggunakan bahasa yang lain selain bahasa Melayu Sambas jika ari-ari (plasenta) masih di Sambas. Keterkaitan antara bahasa Melayu Sambas dan budaya besaprah hal ini didasarkan pada saat pelaksanaan makan besaprah yakni beselak (duduk bersila) dilantai antar sesama kelompok saprahan yang mengelilingi hidangan hal ini menandakan adanya kesetaraan tanpa memandang kelas sosial yang ada pada saat makan besaprah.

Hemafitria, Dasim Budimansyah dan Winataputra pada tahun 2018 penelitiannya terkait penguatan karakter bangsa melalui kearifan lokal saprahan sebagai budaya sipil masyarakat Sambas, penelitian kualitatif dengan studi etnografi yang menghasilkan temuan penting mengenai identifikasi nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat Melayu Sambas melalui tradisi saprahan dan memanfaatkan fungsi nilai tersebut sebagai budaya kewarganegaraan: (1) tradisi saprahan adalah kebiasaan masyarakat Melayu Sambas yang meliputi menikmati makanan yang disajikan dengan membentuk lingkaran dan ber duduk sila dengan membentuk lingkaran dan duduk bersila, ini disajikan dalam acara-acara sebagai berikut pernikahan, tepung tawar, sya’ban dan lainnya tempat biasanya dikonsumsi oleh enam orang; (2) nilai karakter yang tumbuh dari sub kultur Melayu Sambas melalui kearifan lokal tradisi saprahan adalah nilai kebijaksanaan, persahabatan, kepedulian sosial dan nilai keramahan; (3) masyarakat Melayu Sambas yang mengadopsi agama dan adat isiadat sebagai tolak ukur tindakan dianggap sebagai gambaran warga negara yang baik dimata adat dan agama. Adapun kewarganegaraan budaya komunitas Melayu Sambas sudah memiliki pola dalam menerapkan proses identitas warga negara melalui kearifan lokal tradisi saprahan oleh karena itu langkah-langkah adaptasi, pencapaian tujuan dan integrasi dalam karakter yang berfungsi nilai tradisi saprahan sebagai budaya sipil membutuhkan langkah itu dapat mempertahankan pola atau konsistensi.

Penelitian guna, dilakukan Muhamad Firdaus dan Hodiyanto pada tahun 2019 terkait keterkaitan etnomatematika Islami pada tradisi makan besaprah, penelitian kualitatif studi etnografi yang menghasilkan beberapa temuan penting:

(1) peralatan yang dipergunakan untuk kegiatan makan besaprah memiliki Sembilan jenis alat dengan kegunaannya, alat makan ini dapat dieksplorasi sebagai penunjang pembelajaran sekolah berupa alas saprah, pinggan saprah, piring laok, batel, pinggan *nase'*, cawan, baki *ae'*, baki laok, sarbet dan terdapat keterkaitan dengan konsep bangun datar, geometri, pola bilangan dan bangun ruang; (2) dalam pelaksanaan besaprah terdapat empat aktivitas yang dilakukan sebelum makan bersama dilakukan yakni merancap, *bekaot*, menyiapkan sajian saprahan, dan terakhir *besurong*.

Penelitian Sutrisno, Rivae'i dan Budjang (2015) terkait peran tokoh masyarakat menanamkan nilai solidaritas, menghasilkan temuan yaitu dalam tahapan pelaksanaan saprahan diadakanlah musyarakat bersama yang dilakukan tokoh masyarakat, serta masyarakat yang diwakilkan pada Ketua RT dan RW untuk mengundang masyarakat sekitar untuk melaksanakan *pepadu nyarre'* atau musyawarah untuk membentuk seksi-seksi membangun tarup, warga juga membangun emper-emper yaitu tempat menyimpan hidangan makanan untuk pelaksanaan hari besar agar dapat terselenggara dengan sukses serta terkendali dengan aman.

Penelitian oleh guna Nahak (2019) terkait usaha dalam melestarikan budaya Indonesia ditengah arus global, mengungkapkan upaya melestarikan kearifan lokal atau budaya lokal dapat dilakukan dengan memupuk daya sadar akan mendasarnya kebudayaan sebagai kepribadian bangsa, dalam upaya pelestariannya masyarakat harus dapat berkontribusi aktif melestarikan, melaksanakan serta mempelajarinya dan melakukan sosialisasi kepada khalayak ramai agar masyarakat terdorong untuk menjaga dan melakukan pelestarian bahkan menjaga keutuhan kebudayaannya.

Sementara itu, Penelitian guna Atika, Rabia & Syahrani (2015) terkait Peristilahan Dalam Ritual Tuang Minyak Pada Masyarakat Melayu Sambas menunjukkan *nyarrok* adalah bahasa yang digunakan mengundang orang untuk hadir dalam suatu acara yang dikenal dalam masyarakat Sambas. Penelitian yang dilakukan oleh Lizawati (2017) terkait pendidikan karakter dalam budaya saprahan, menunjukkan bahwa tradisi budaya saprahan tidak lepas dari semangat gotong royong masyarakat yang berkontribusi dalam mensukseskan saprahan mulai dari

persiapan mulai dari membuat tenda untuk memasak, tempat acara serakalan, tempat tanjidor, dan sebagainya.

Prasojo & Lia (2020) penelitiannya terkait nilai kebersamaan pada tradisi belalle'diaspora Melayu Sambas menegaskan *belale'* memiliki beberapa keutamaan yaitu dapat secara mudah menyelesaikan suatu pekerjaan, terbangunnya karakter gotong royong dalam pekerjaan yang tinggi, yang mana semakin tingginya semangat gotong royong tadi dapat menumbuh kembangkan rasa kebersamaan dan kepedulian antara individu satu dan yang lain dan pada akhirnya terbangunlah rasa kedamaian dalam kehidupan sosial masyarakat.

Kemudian Penelitian yang telah dilakukan Muallimin pada tahun 2020 terkait makan besaprah: pesan dakwah dalam bingkai tradisi pada masyarakat Melayu Sambas, penelitian kualitatif metode semiotika yang menghasilkan beberapa temuan penting dimana pesan dakwah dalam tradisi makan besaprah disampaikan melalui simbol- simbol budaya: (1) pesan akidah terkait ketauhidan dan rukun iman, akidah berasal dari al'aqdu yang artinya ikatan dalam tradisi saprahan akidah direpresentasikan dengan ketentuan jumlah sendok dalam satu saprah adalah dua buah, angka dua ini pada dasarnya adalah simbolisasi syahadat sedangkan untuk rukun iman direpresentasikan melalui ketentuan jumlah orang dan jenis lauk pauk dalam satu saprah yaitu enam atau lima; (2) pesan syariat terkait ketaatan melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan sehari- hari, dimensi syariat adalah pesan dakwah yang terkait dengan aturan dan ketentuan hokum dalam pengalaman ajaran Islam seperti ibadah dan muamalah. Pesan syariat dalam tradisi makan besaprah direpresentasikan dengan jumlah orang dan jenis lauk pauk. Angka lima ini adalah simbolisasi kewajiban shalat bagi setiap umat Islam yang telah baligh; (3) pesan akhlak terkait silaturahmi, tolong- menolong, memuliakan manusia dan kesetaraan derajat antara sesama manusia, pesan akhlak sangat dominan ditemukan dalam tradisi besaprah. Hampir keseluruhan pesan dalam makan besaprah adalah terkait dengan kemuliaan akhlak menjadi sangat penting bagi Melayu Sambas. Pesan akhlak dalam tradisi makan besaprah dapat diklasifikasikan sebagai berikut silaturahmi dan ta'awun (tolong- menolong), memuliakan sesama terutama tamu dan orang tua dan kesetaraan, dimana pesan kesetaraan dalam makan besaprah merupakan manifestasi dari ajaran Islam tentang egaliter konsekuensi dari

prinsip tersebut manusia memiliki hak dan peluang yang sama dihadapan Allah SWT.

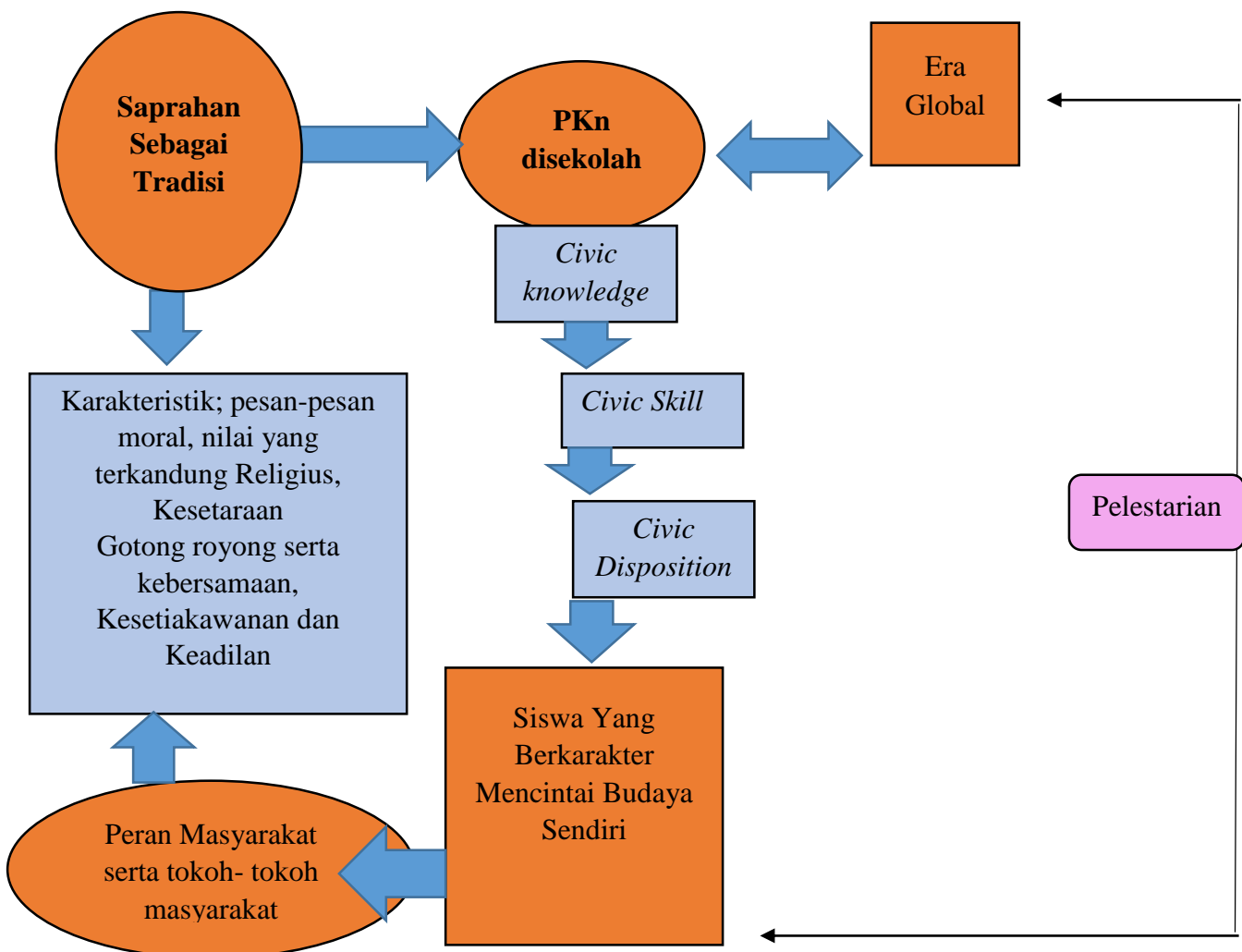
Berdasarkan penjabaran beberapa penelitian terdahulu yang relevan diatas, terkait penelitian tentang tradisi saprahan bukan merupakan penelitian yang pertama juga telah banyak dibahas serta dikaji sedemikian rupa, namun yang membedakan penelitian yang ingin peneliti ungkap dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian ini berupaya mengkaji analisis tradisi saprahan sebagai kearifan lokal di era global untuk memperkaya pembelajaran PKn. Dimana hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan *novelty* terhadap penelitian Pkn kedepannya yakni sebagai bahan pembelajaran PKn yang ter upload yang digunakan sebagai sumber informasi, bahan pembelajaran, masukan bagi pembaca, guru, peserta didik, dan bagi peneliti dalam memperkaya mempelajari PKn. Selain itu penelitian ini juga memberikan kontribusi semakin maju dan berkembangnya komunitas musik dan tanjidor dalam acara makan besaprah alhasil ini memberikan output yang baik terhadap kemandirian dan pendapatan masyarakat setempat.

## **2.5.PARADIGMA PENELITIAN**

Penelitian pada esensinya adalah suatu proses penyidikan untuk mendapatkan keabsahan dengan cara mengumpulkan, mengolah serta menganalisis dan tahap terakhir menyimpulkan sebuah data atas dasar pertimbangan metode, pendekatan dan tehnik dalam menanggapi pertanyaan penelitian yang coba dikaji.

Dalam upaya memfokuskan serta memudahkan prosedur berpikir dibuatlah sebuah paradigma penelitian. Adapun berikut ini digambarkan paradigma penelitian dalam bentuk bagan yakni:

Bagan 2.1 Paradigma Penelitian



Sumber: Data diolah oleh Peneliti Tahun 2021